

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI
PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

NUNIK FILDZAH ROZIANA

NIM 4318123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI
PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

NUNIK FILDZAH ROZIANA

NIM 4318123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunik Fildzah Roziana

Nim : 4318123

Judul Skripsi : **Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparaansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kabupaten Pematang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juli 2025

Yang menyatakan,



NUNIK FILDZAH ROZIANA

NIM. 4318123

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nunik Fildzah Roziana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : **Nunik Fildzah Roziana**
NIM : **4318123**
Judul : **Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kabupaten Pemasang**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juli 2025
Pembimbing,



Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A
NIP.198706302018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan mengesahkan skripsi saudari:

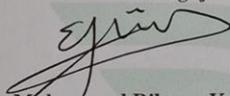
Nama : NUNIK FILDZAH ROZIANA
NIM : 4318123
Judul : PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Dosen Pembimbing : Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A.

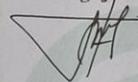
Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Dewan Penguji

Penguji I


Muhammad Rizkam Kamal, M.Kom
NIP. 198812312019031011

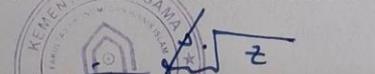
Penguji II



Jilma Dewi Ayu Ningtyas, MSi
NIP. 199101092020122016

Pekalongan, 10 Juli 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 19780616200312103

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah:6-7)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Ummar bin Khattab)

“Atasilah satu kesulitan anda, maka anda akan terhindar dari ribuan kesulitan yang lain”

(Pribahasa Cina)

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu. Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakannya”

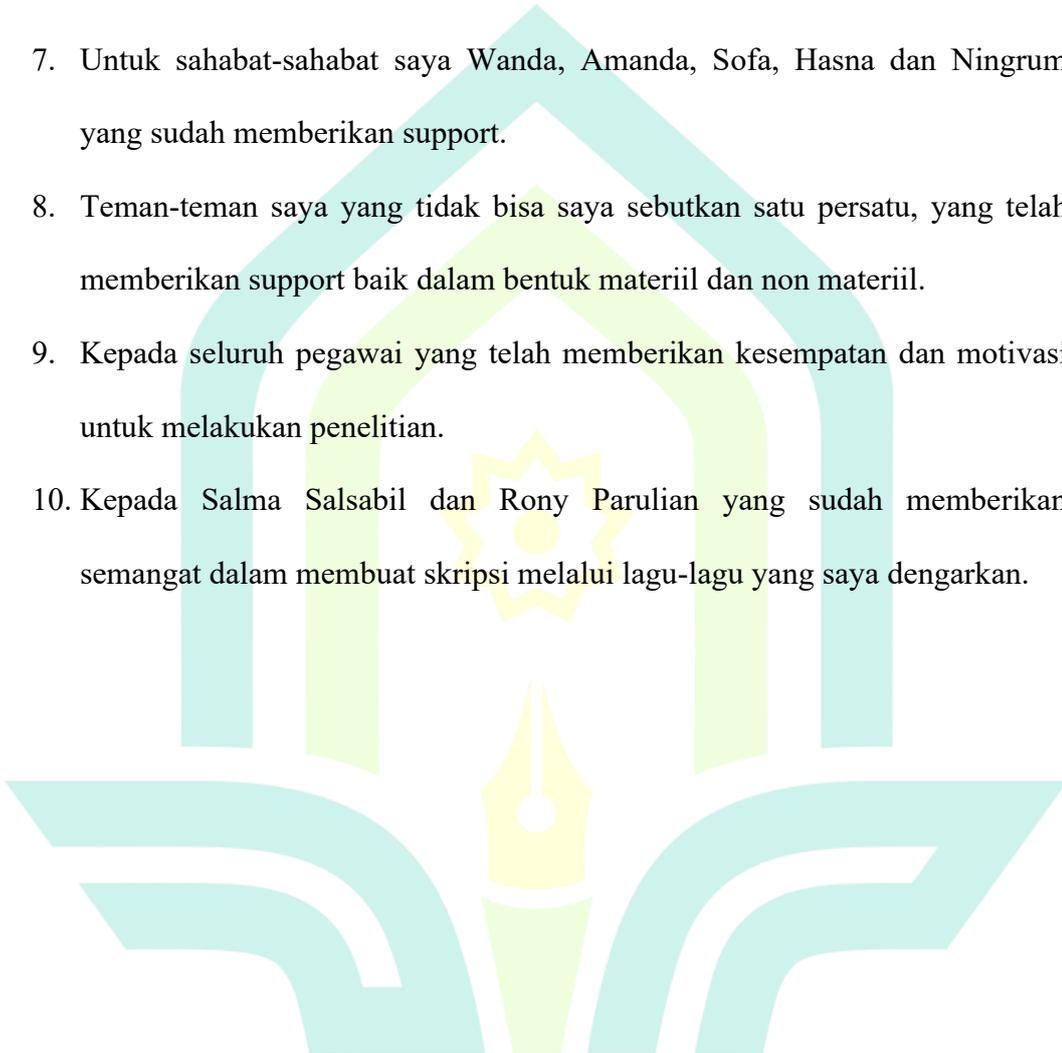
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta saya, terima kasih Bapak dan Ibu yang selalu mengiringi setiap langkah saya, memberikan motivasi, memanjatkan do'a dan segala kasih sayang yang tak terhingga.
2. Untuk keluarga saya, kakak-kakak saya, yang selalu memberikan dukungan dan do'a nya.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya, bimbingan dan dukungan.
4. Almamater Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Kepada Dosen Pembimbing Bu Ria Anisatus Sholihah, S. E., M.S.A, yang tanpa lelah membimbing dan meluangkan waktu hingga akhirnya skripsi ini selesai.
6. Kepada Wali Dosen Ahmad Rosyid, S.E., M.Si, yang selalu memberi saran, bantuan dan do'a.
7. Untuk sahabat-sahabat saya Wanda, Amanda, Sofa, Hasna dan Ningrum yang sudah memberikan support.
8. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan support baik dalam bentuk materiil dan non materiil.
9. Kepada seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan dan motivasi untuk melakukan penelitian.
10. Kepada Salma Salsabil dan Rony Parulian yang sudah memberikan semangat dalam membuat skripsi melalui lagu-lagu yang saya dengarkan.



ABSTRAK

NUNIK FILDZAH ROZIANA. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran dan menjadi pedoman bagi pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah asosiatif kausal dengan menghubungkan variabel independen satu atau lebih. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Populasi penelitian ini adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pematang Jaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 132 responden. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 25

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD (2) Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBD (3) Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBD (4) Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan APBD. Hasil uji *Moderate Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik tidak dapat memoderasi hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan pengelolaan APBD. kemudian variabel Transparansi Publik dan Pengawasan dapat memoderasi antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan Pengelolaan APBD.

Kata Kunci : Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Pengawasan, Pengelolaan APBD, Standar Akuntansi Pemerintah.

ABSTRACT

NUNIK FILDZAH ROZIANA. The Influence of Public Accountability, Public Transparency and Supervision on APBD Management with Government Accounting Standards as a Moderating Variable in Pematang Rejang Regency Government.

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the annual financial plan of the regional government approved by the DPRD and stipulated by regional regulations. The APBD regulates regional income and expenditure for one budget year and becomes a guideline for government and development.

This study aims to determine and analyze the influence of public accountability, public transparency and supervision on APBD management.

This study uses a quantitative research approach and the type of research is associative causal by connecting one or more independent variables. The method of data collection in this study uses a questionnaire. The population of this study is the Regional Apparatus in Pematang Rejang Regency. The sampling technique uses Purposive sampling with a sample size of 132 respondents. The analysis method uses multiple linear regression with the help of SPSS 25

The results of this study indicate that (1) Public Accountability does not have a significant effect on APBD Management (2) Public Transparency has a significant effect on APBD Management (3) Supervision has a significant effect on APBD Management (4) Public Accountability, Public Transparency and Supervision simultaneously affect APBD Management. The results of the Moderate Regression Analysis (MRA) test indicate that Public Accountability cannot moderate the relationship between Government Accounting Standards and APBD management. then the variables Public Transparency and Supervision can moderate between Government Accounting Standards and APBD Management.

Keywords: Public Accountability, Public Transparency, Supervision, APBD Management, Government Accounting Standards.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag, selaku Dekan FEBI Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ahmad Rosyid, S.E, M.Si, Ak.CA selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan saya untuk cepat selesai studi.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.

9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

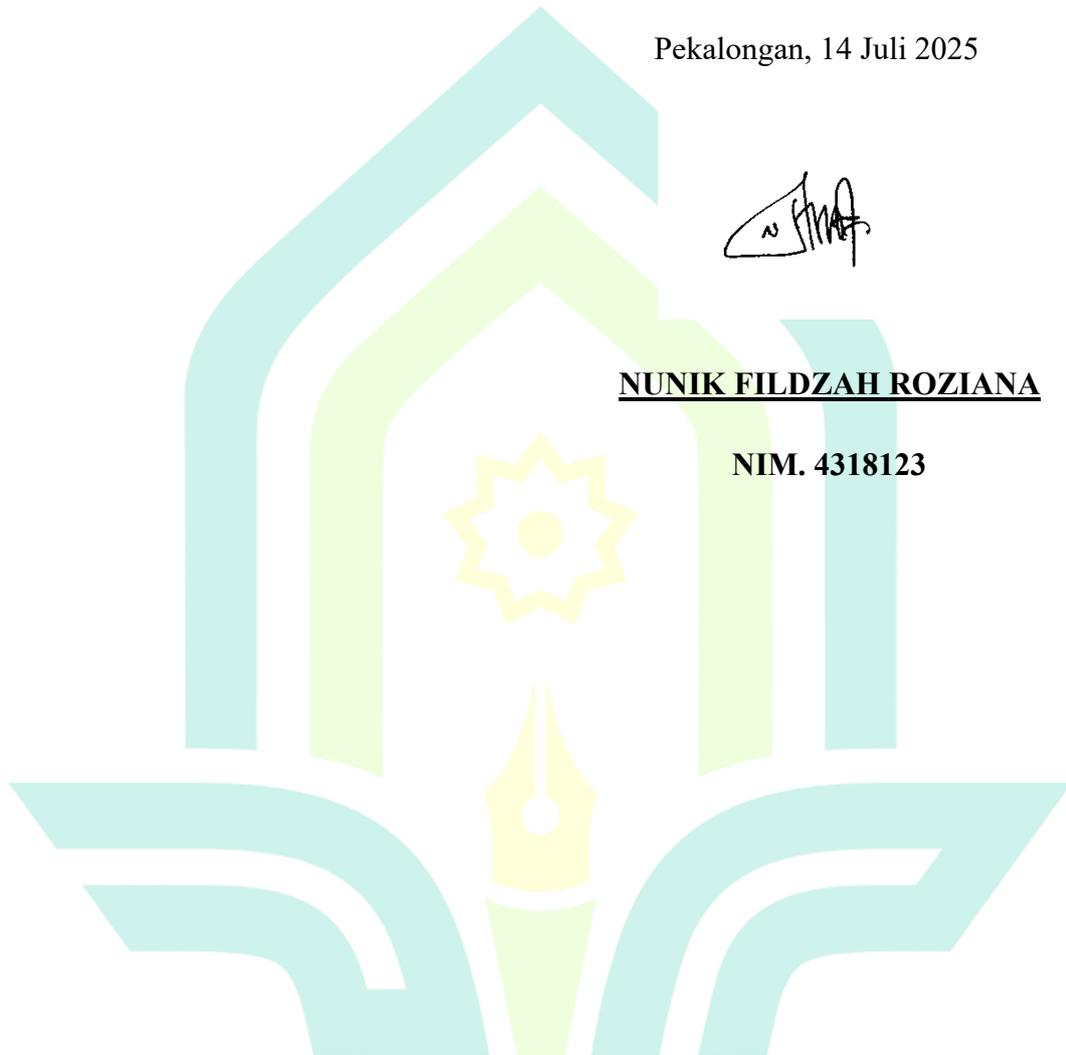
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekalongan, 14 Juli 2025



NUNIK FILDZAH ROZIANA

NIM. 4318123



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR GRAFIK	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7

C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Stewardship	10
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	11
3. Akuntabilitas Publik.....	15
4. Transparansi Publik	17
5. Pengawasan.....	18
6. Standar Akuntansi Pemerintah.....	18
B. Telaah Pustaka	20
C. Kerangka Berpikir.....	25
D. Pengembangan Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Setting Penelitian	32
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	34
D. Variabel Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	36

F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Metode Analisis Data.....	36
1. Uji Kualitas Data.....	36
2. Uji Asumsi Klasik.....	38
3. Uji Hipotesis	40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian.....	44
B. Karakteristik Umum Responden.....	44
C. Hasil Analisis Data	46
D. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
C. Implikasi	66
D. Keterbatasan Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Pustaka	20
Tabel 3.1 Lokasi Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan	45
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Publik.....	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Transparansi Publik	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pengawasan.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah.....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pengelolaan APBD	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Moderasi	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	53
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.15 Hasil Uji F (Simultan).....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji T (Parsial)	57

Tabel 4.10 Hasil Uji *Moderate Regression Analysis*58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Model Penelitian	25
---	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Uji Normalitas.....	51
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	70
Lampiran 2 Pernyataan Kuesioner.....	71
Lampiran 3 Tabulasi Responden.....	76
Lampiran 4 Output Uji Validitas.....	108
Lampiran 5 Output Uji Reliabilitas.....	114
Lampiran 6 Output Uji Normalitas.....	115
Lampiran 7 Output Uji Multikolinieritas.....	117
Lampiran 8 Output Uji Heterokedastisitas.....	118
Lampiran 9 Output Uji Regresi Linear Berganda.....	119
Lampiran 10 Output Uji Hipotesis.....	120
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian.....	121
Lampiran 12 Surat Keterangan Penelitian.....	123
Lampiran 13 Dokumentasi.....	124
Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pematang Jaya pada saat sekarang ini memang masih mengalami kondisi yang mana pengelolaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)nya relatif besar namun ruang geraknya terbatas karena proporsi penggunaannya untuk belanja-belanja yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat cukup besar. Pemerintah juga memprioritaskan APBD untuk belanja pengelolaan penggunaan jalan (pematangkab.go.id).

Pada peristiwa yang terjadi belakangan ini yang bisa dilakukan pengamatan terutama terkait dengan pengelolaan APBD Kabupaten Pematang Jaya pada saat sekarang ini ialah keharusan didalam pelaksanaan dan juga penerapan akuntabilitas dan transparansi publik yang kian menguat. Peristiwa lain yang terjadi belakangan ini tentang APBD yang dikelola, bahwasannya penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan bagaimana mengelola APBD dengan transparan, tepat dan juga cepat, yang mana harus dilakukan publikasi ke masyarakat secara keseluruhan belum diperoleh.

Informasi yang didapat pada saat musyawarah rencana pembangunan yang menjadi prioritas yang diusulkan oleh masyarakat adalah masalah infrastruktur jalan. Didalam pelaksanaan dilapangan, penyusunannya didasarkan pada prioritas yang tidak menyesuaikan dengan usulan musyawarah, hal ini terlihat pada keluhan dari masyarakat yang sampai saat ini jalannya belum juga diperbaiki. Kemudian peristiwa yang terjadi dimana

berhubungan dengan akuntabilitas, pengawasan, dan juga transparansi dalam mengelola APBD di Kabupaten Pemalang adalah akuntabilitasnya rendah, pelaksanaan anggaran yang kurang maksimal.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mengusulkan adanya perubahan APBD yang nantinya akan dialokasikan lebih untuk infrastruktur. Yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pemalang saat ini adalah soal infrastruktur yang menyebabkan beberapa kali ada aksi massa menyuarkan perbaikan jalan maka perlu adanya penambahan anggaran untuk proyek fisik. Plt Bupati Pemalang juga menyatakan akan ada pemangkasan anggaran ataupun *refocusing* secara besar-besaran demi memenuhi aspirasi masyarakat (kanalindonesia.com).

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat dalam penyaluran dana, antara lain batasan minimal penyerapan anggaran dan capaian output serta pembatasan waktu penyampaian laporan. Bahkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik mensyaratkan dilakukannya review dan verifikasi oleh pengawasan internal pemerintah (APIP). Jika tidak dapat dipenuhi, maka dana yang bisa dicairkan hanya sebagian saja (puskamik.com).

Pada tahun 2021 APBD Kabupaten Pemalang mengalami defisit miliaran rupiah. Diantaranya melakukan pengambilan ataupun pemangkasan pada dana SKPD yakni anggaran dana untuk perjalanan dinas dan juga makan dan minum. Selanjutnya adanya penambahan dari tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipangkas sebesar 25% pada beberapa bulan terakhir (pantura.inews.id).

Kemudian pada tanggal 28 September 2022 hasil evaluasi Raperda dalam rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang perubahan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2022 pengaruh terhadap postur perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 terutama pada pos anggaran pendapatan dan pos anggaran belanja. Apabila dibandingkan dengan postur anggaran yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 September 2022 yang lalu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah dengan kesepakatan DPRD mengalokasikan anggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar 2% yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU). Dengan jumlah alokasi sebesar Rp. 5.755.975.000 yang penyediaan anggarannya dipenuhi dengan melakukan realokasi anggaran belanja dan mengoptimalkan target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) ataupun dari transfer pemerintah pusat.

Perubahan postur anggaran sebagai akibat penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi yang dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan realokasi belanja daerah adalah pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 2.499.245.247.000 menjadi sebesar Rp. 2.502.892.247.000 bertambah Rp. 3.647.000.000 atau 0,15%. Belanja daerah yang semula diproyeksikan

sebesar Rp. 2.665.840.660.000 menjadi Rp. 2.669.487.660.000 bertambah sebesar Rp. 3.647.000.000 atau 0,14%. Menurut data dari DPUTR sampai saat ini proses perbaikan jalan di Kabupaten Pemalang sudah mencapai 17,4 kilometer dari target yang ditentukan yaitu 85 kilometer sehingga sisanya masih ada 67,6 kilometer lagi (joglojateng.com).

Pada tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 2,84 triliun.

Kegiatan seperti melakukan suatu pengelolaan pada anggaran memanglah sangat penting untuk dilakukan, ini dikarenakan pengelolaan yang dilakukan tersebut hasil akhirnya harus disampaikan dan dipertanggung jawabkan dengan terbuka apa adanya tanpa ditutup-tutupi kepada khalayak publik (Safitri & Mildawati, 2019). Dengan adanya kegiatan tersebut harapan masyarakat atau publik bisa terealisasi dalam mengelola keuangan daerah (APBD).

Keakuntabilisan dalam mengelola APBD bisa diperlihatkan dari kewajiban pemerintah daerah terkait dengan amanat tanggung jawab yang telah diberikandalam melakukan penyajian dan juga melakukan pelaporan keseluruhan kegiatan aktivitas yang mempergunakan uang publik, yang harus dipertanggung jawabkan tersebut (DPRD). Akuntabilitas didalam mengelola APBD mempunyai beberapa aspek yang bisa dibbilang cukup penting yakni legalitas, dimana untuk setiap transaksi diharuskan untuk bisaterdeteksi oleh otoritas legalitasnya. Sehingga jika akuntabilitas publik yang kian tinggi

hal ini harusnya di ikuti dengan pengelolaan APBDnya yang juga kian baik begitupun sebaliknya.

Akuntabilitas bisa tercapai apabila keseluruhan SKPD secara bersamaan ikut didalam menyusun dana anggaran APBD. Dengan adanya hal itu, diharapkan anggaran yang disusun tersebut bisa berimplikasi pada meningkatnya produktivitas kerja dan bisa mungkin agar bisa dikelola dengan baik dan maksimal. Kualitas proses penganggaran sendiri menjadi satu diantara faktor yang bisa memberi pengaruhnya pada kualitas proses pengukuran kinerja, dikarenakan hal tersebut mempunyai jalinan korelasi pada proses penganggaran yang dilakukan (Wianti, 2016). Penelitiannya Septi Mayasari (2017) menunjukkan bahwasannya akuntabilitas publik memberi pengaruh pada pengelolaan APBD.

Suatu pemerintahan yang baik bisa terwujud apabila menerapkan transparansinya pada dana APBD, karena hal tersebut juga termasuk didalam upaya suatu pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pada kesejahteraan masyarakatnya. Didalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa menjamin apa yang dibuthkan oleh masyarakat secara efektif dengan memanfaatkan dalam memaksimalkan keefisienan anggaran pada realisasi program kegiatannya (Suketi, Fatmasari, 2015). Penelitiannya Hari Sriwijayanti (2018) menunjukkan bahwasanya transparansi memberi pengaruh pada pengelolaan APBD.

Menurut Setiyawan dan Safri (2016) Pengelolaan APBD bisa dikatakan baik apabila prinsip dari *Value For Money* sudah diterapkan dan

mutlak direalisasikan. Implementasi prinsip tersebut dipercaya bisa melakukan perbaikan kinerja pada organisasi sektor publik. Prinsip tersebut sebagai suatu prinsip yang melakukan pengelolaan berdasarkan pada lima elemen utama, yakni efektifitas, efisien, ekonomi, *equality*, dan *equity*. Dan prinsip tersebut bisa tercapai apabila organisasi sudah mempergunakan pengeluaran input terkecil agar dicapainya output dan tujuan yang maksimal.

Transparansi dan akuntabilitas sebagai unsur yang bisa menentukan bahwasannya setiap hasil akhir dari kegiatan mengelola suatu dana APBD untuk bisa dipertanggungjawabkan penuh kepada masyarakat publik. Akuntabilitas dan transparansi ialah karakteristik utama yang harus ada didalam mengelola dana APBD terutama dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Sitompul, 2014).

Suatu pengelolaan APBD yang baik bisa tercapai dan hal itu tidak lepas dari yang namanya suatu pengawasan publik yang dilaksanakan oleh pimpinan langsung yakni sebagai pihak yang mempergunakan dana anggaran tersebut. Tetapi bisa juga dilaksanakan oleh suatu lembaga yang bertugas khusus untuk mengawasi serta legislatif yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengontrolan pada proses yang direncanakan untuk mengendalikan dana APBD. Kegiatan mengawasi dana APBD dibutuhkan guna proses yang direncanakan dan tersusun berjalan dengan efektif dan efisien apakah bisa diketahui (Siregar, 2011). Penelitian dari Nurul Hutami Ningsih (2017)

menunjukkan bahwasannya pengawasan memberi pengaruh pada penatausahaan APBD berkonsep *value for money*.

Berdasarkan uraian diatas kemudian dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan juga memiliki kesimpulan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga itu penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD?
2. Apakah transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD?
3. Apakah pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD?
4. Apakah standar akuntansi pemerintah dapat memoderasi antara akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD?
5. Apakah standar akuntansi pemerintah dapat memoderasi antara transparansi publik terhadap pengelolaan APBD?

6. Apakah standar akuntansi pemerintah dapat memoderasi antara pengawasan terhadap pengelolaan APBD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurutkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan APBD.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan APBD.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD dapat di moderasi standar akuntansi pemerintah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan APBD dapat di moderasi standar akuntansi pemerintah.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan APBD dapat di moderasi standar akuntansi pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan ini mampu memberimanfaat terkait dengan pengembangan ilmu keakuntansianterkhususpada ilmu akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Terdapat harapan dari hasilnya yang didapat disini bisa mendatangkan tambahan pengetahuan bagi penulis berkenaan dengan pencapaian akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan hubungannya dengan keberhasilan dinas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan agar bisa meningkatkan transparansi kebijakan publik khususnya kebijakan tentang anggaran sehingga dapat meningkatkan pengawasan anggaran dan untuk memberikan masukan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini bisa memberi referensi dan kemudahan dalam penelitian selanjutnya terkhususpada bidang akuntansi sektor publik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah diuraikan dari “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten Pematang” berdasarkan hasil analisis data SPSS dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil uji f (simultan) nilai signifikansi variabel akuntabilitas publik secara keseluruhan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD. Dari hasil uji t (parsial) variabel akuntabilitas publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD.
2. Dari hasil uji f (simultan) dan uji t (parsial) nilai signifikansi bahwa variabel transparansi publik secara keseluruhan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.
3. Dari hasil uji f (simultan) dan uji t (parsial) nilai signifikansi bahwa variabel pengawasan secara keseluruhan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.
4. Dari hasil uji *Moderate Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik tidak dapat memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD.

5. Dari hasil uji *Moderate Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa variabel transparansi publik dapat memoderasi antara standar akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD.
6. Dari hasil uji *Moderate Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa variabel pengawasan dapat memoderasi antara standar akuntansi pemerintah dengan pengelolaan APBD.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini walaupun tidak semua variabel memiliki pengaruh terhadap pengelolaan APBD tetapi terdapat

2. Implikasi Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan pembandingan dalam rangka melakukan penelitian tambahan di bidang ini, maupun oleh pihak-pihak yang membutuhkan referensi terkait dengan ini skripsi ini secara tertulis maupun bacaan. Yang berfungsi sebagai referensi masa depan, terutama dibidang akuntansi pemerintah.

b. Bagi penulis

Bermanfaat untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan publik terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Dengan menggunakan berbagai metode dan alat ukur agar dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

c. Bagi pemerintah daerah

Sebagai informasi, referensi dan pembandingan, dapat dijadikan bahan pembandingan bagi OPD terkait agar dalam melaporkan dan mengevaluasi tingkat kinerja keuangan lebih terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Terutama terhadap pengelolaan APBD yang akuntabel maupun transparan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Populasi pada penelitian ini hanya mencakup dinas dan badan di Kabupaten Pematang Jaya saja.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel bebas yakni akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan,
3. Pengumpulan data penelitian hanya menggunakan kuesioner tanpa wawancara secara langsung.

D. Saran

Penelitian ini diharapkan bisa mempersembahkan hasil yang lebih bermutu dengan adanya beberapa saran tentang sejumlah hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan atas pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi. Untuk penelitian berikutnya variabel penelitian bisa diubah untuk memakai variabel lain yang memiliki pengaruh besar atas pengelolaan APBD di sektor lain.
2. Penelitian berikutnya diharapkan bisa menambahkan total sampel penelitian serta meningkatkan cakupan sampel penelitian, tidak hanya SKPD di Kabupaten Pemalang namun pada SKPD di Kabupaten-kabupaten lain pula. Sehingga hasil penelitian yang lebih umum bisa diperoleh serta kesimpulan umum bisa ditarik dari hasil penelitian dengan lebih mudah.
3. Penelitian berikutnya dilaksanakan interview kepada responden secara jelas supaya bisa menghasilkan data yang lebih konkret serta bisa menghilangkan pertanyaan-ertanyaan kuesioner yang tidak mencitrakan situasi yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, Mohammad Noor. 2020. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020*. Kindai Vol. 17 Nomor 3.
- Ahmad, Rofi dan Susilawati. 2025. *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. JEMSI E-ISSN : 2579-5635.
- Anggrayeni, Rama Linda dkk. 2021. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi*. Islamic Accounting and Finance Review Volume 2 Nomor 2.
- Bakar, Usman Abu, dkk. 2012. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi. Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi Tujuh. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPEE) UGM Yogyakarta.
- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar dan Miah Said. 2021. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai*. Idn. J. Of Business and Management. e-ISSN : 2460-3767, p-ISSN : 2656-6885.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habiburrahman. 2016. *Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 6 No. 2.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Hasugian, Fredo TSP dkk. 2021. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 6 No. 2.

- Husain, Fauziah, dkk. 2025. *Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo 2021-2023*. Jurnal e-ISSN: 2654-8488 Vol. 24 No. 1.
- Khaliq, Muhammad. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kurniawan, Asep. 2016. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas. Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur*. Dimensia Volume 13 Nomor 2.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 1.
- Mayasari, Septi. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderat Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Ningsih, Nurul Hutami. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD Berkonsep Value For Money Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Di SKPD Kota Palembang*. Jurnal Artikel.
- Ningsih, Lestari Widiah dan Lingga Yuliana. 2024. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor Jepara*. MASMAM Vol. 3 No. 2. e-ISSN : 3025-7433, p-ISSN : 3025-7441.
- Peraturan Bupati Pematang Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 tentang APBD.
- Peraturan Bupati Pematang Nomor 80 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1.
- Rahmayani, Melia Wida dan Engkun Kurnadi. 2022. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Kadipaten)*. Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022. e-ISSN : 2776-2483, -ISSN : 2723-1941.

- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media Jakarta.
- Royman, Stefanus Lobo. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money*. Tesis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Yogyakarta.
- Safitri, Dahlia Dwi dan Titik Mildawati. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. E-ISSN: 2460-0585.
- Siregar, Liper. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Sriwijayanti, Hari. 2018. Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). Jurnal Ekobistek Vol.7, No. 1.
- Sumarno, Hadi. 2003. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah*. JESP Vol.
- Susanti, Mirna, dkk. 2023. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue)*. JAM, Vol. 2 No. 1, ISSN : 2962-6927.
- Tamara, Chintia Ayu dan Yunus Tete Konde. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman Vo. 1 (1).
- V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Wahyudi, A'at Taufik. 2023. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Yassir, Mursalim dan Asriani Junaid. 2022. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan*. Journal Of Management Volume 5 Issue 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Nunik Fildzah Roziana
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 14 Maret 1999
Alamat rumah : Perumahan Widuri Asri blok E No. 9 Kec.
Pemalang, Kab. Pemalang
Nomor HP : 082325313312
Email : nunikfildzah0@gmail.com
Nama ayah : Faroji
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
Nama ibu : Titin Maryatin
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 01 Widuri (2005-2011)
2. SMP : MTs Negeri Pemalang (2011-2014)
3. SMA : SMK PGRI 2 Taman Pemalang (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 10 Juli 2025

Nunik Fildzah Roziana